

ABSTRAK

Perkembangan peradaban dunia semakin hari berkembang menuju modernisasi. Perkembangan yang selalu membawa perubahan dalam setiap sendi kehidupan tampak lebih nyata. Seiring dengan itu pula bentuk-bentuk kejahatan juga senantiasa mengikuti perkembangan zaman dan bertransformasi dalam bentuk-bentuk yang semakin canggih dan beraneka ragam. Salah satu tindak pidana yang sekarang fenomenal dan sangat merugikan negara adalah masalah korupsi. Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dijumpai disetiap bidang kehidupan masyarakat baik dibidang ekonomi, hukum, sosial budaya maupun politik. Fakta adanya sejarah membuktikan bahwa hampir setiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah sbb:

Bagaimana pertanggungjawaban terhadap pengguna anggaran dalam tindak pidana korupsi dana bantuan sosial. dan Modus tindak pidana korupsi Dana Bantuan Sosial terhadap upaya pengembalian kerugian Negara, Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan: Pertanggungjawaban terhadap pengguna anggaran dalam tindak pidana korupsi dana bantuan sosial. Menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban pidana dari terpidana penerima kewenangan dalam tindak pidana korupsi Dana Bantuan Sosial di Kabupaten Bengkalis mantan Bupati Bengkalis, tak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, bahwa telah memenuhi unsur kesalahan dan unsur kesengajaan. sesuai dengan terpenuhinya unsur sifat melawan hukum oleh terdakwa, yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Modus tindak pidana korupsi Dana Bantuan Sosial terhadap upaya pengembalian kerugian Negara. Berbagai modifikasi kasus yang sering terkenal dengan mark-up, anggaran kegiatan fiktif dan modus-modus lain pada beberapa pos anggaran yang telah disusun. Banyak sekali mata anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini terjadi karena adanya konspirasi antara legislatif dan eksekutif dalam penyusunan, pembahasan, penetapan dan implementasi di lapangan yang justru banyak ditemukan menyimpang dan tidak mempunyai landasan hukum yang jelas.

Melihat hal di atas sungguh ironis, karena korupsi akan menjadi faktor penghambat pembangunan di segala bidang. Uang yang idealnya digunakan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan sebagainya menjadi terhambat karena anggaran telah dikorupsi oleh pejabat, dampak lain, korupsi juga memperbesar tindak pidana pencucian uang.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban pengguna anggaran terhadap dana bantuan sosial.

ABSTRACT

The development of world civilization is growing day to modernization. The ever-changing development in every aspect of life seems more real. Along with it also forms of evil also always follow the times and transformed in forms of increasingly sophisticated and diverse. One of the crimes that is now phenomenal and very detrimental to the state is the problem of corruption. Corruption is a symptom of the society found in every area of life of the community, whether in the economic, legal, social and cultural fields. The fact of history shows that almost every country is faced with corruption. The problems in this research are as follows:

How accountable to budget users in the corruption of social assistance funds. and Mode of corruption of the Social Aid Fund against the State's repatriation efforts, Based on the results of the study and discussion: Accountability to budget users in the corruption of social assistance funds. To show that criminal liability of convicted recipients of authority in the corruption crime of Social Aid Fund in Bengkalis Regency former Regent of Bengkalis, unable to account for his actions, that has fulfilled the element of mistake and element of intent. in accordance with the fulfillment of the element of unlawful nature by the defendant, set forth in Law No. 20 of 2001 on the Eradication of Corruption.

The mode of corruption of the Social Aid Fund against the State's recovery efforts. A variety of case modifications are often famous for mark-ups, fictitious activity budgets and other modes on some budget posts that have been compiled. Lots of budget eyes that are not in accordance with the provisions set in the legislation. This happens because of a conspiracy between the legislature and the executive in the preparation, discussion, penyepan and implementation in the field that actually found many deviant and has no clear legal basis.

Looking at the above is quite ironic, because corruption will be a factor inhibiting development in all areas. Money that is ideally used for financing infrastructure development, economic empowerment of the community, and so forth becomes impeded because the budget has been corrupted by officials, other impacts, corruption also enlarges money laundering.

Keywords: Account user accountability to social assistance funds.